



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK**





Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai.

Pada tahun 2023, BPBD Kota Pontianak telah membentuk 1 Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), yaitu Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Pembentukan Kelurahan Parit Tokaya sebagai Kelurahan Tangguh Bencana diharapkan kelurahan tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, sehingga kelurahan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

Penyusunan LKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan analisis capaiannya selama tahun 2023 beserta strategi yang digunakan oleh BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi

bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, saya berharap laporan kinerja ini dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas kinerja kami di masa mendatang dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak secara komprehensif. Kritik dan saran membangun dengan senang hati akan kami terima dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Terima kasih.

Pontianak, 31 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ir. R.M. NASIR, MT
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19690416 199603 1 005

BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. GAMBARAN UMUM	4
	1. Pendahuluan	4
	2. Susunan Organisasi	5
	3. Tupoksi	6
	4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	7
	5. Sumber Daya Keuangan	8
	6. Sarana dan Prasarana	8
	B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
	A. RENSTRA	13
	1. Visi	13
	2. Misi	14
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	16
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
	B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV	PENUTUP	29
	LAMPIRAN	30



Kegiatan pemasangan rambu larangan membakar lahan sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setiap Tahunnya Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri Dan BAPPENAS. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun laporan pencapaian target kinerja pemerintah Kota Pontianak.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak pada Tahun 2023 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program BPBD Kota Pontianak, serta mengacu kepada visi dan misi Walikota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Renstra BPBD 2020-2024, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2023

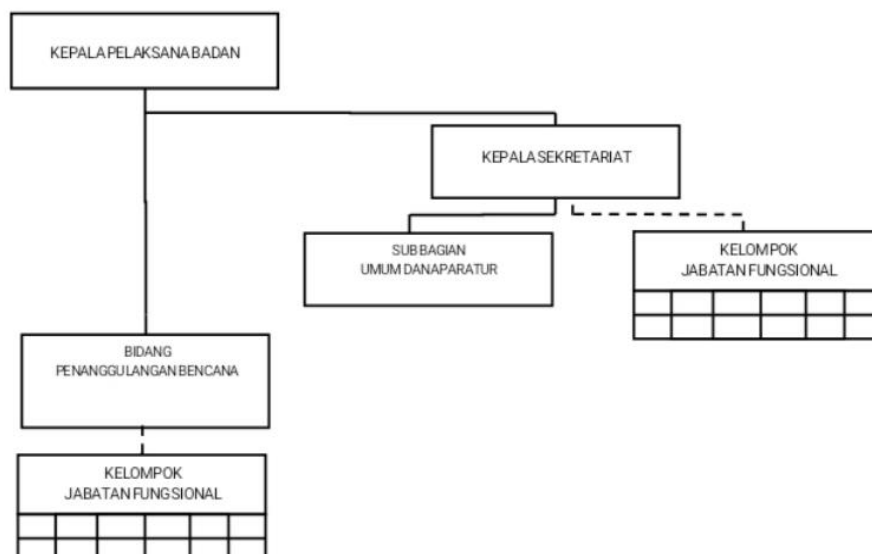
pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan BPBD Kota Pontianak dalam mengelola semua sumber daya yang ada melalui perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan / atau Penetapan Kinerja (PK) BPBD Kota Pontianak Tahun 2023.

2. Susunan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pontianak di bidang Penanggulangan Bencana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang secara ex-officio jabatan oleh Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi BPBD Kota Pontianak sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK



3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana.

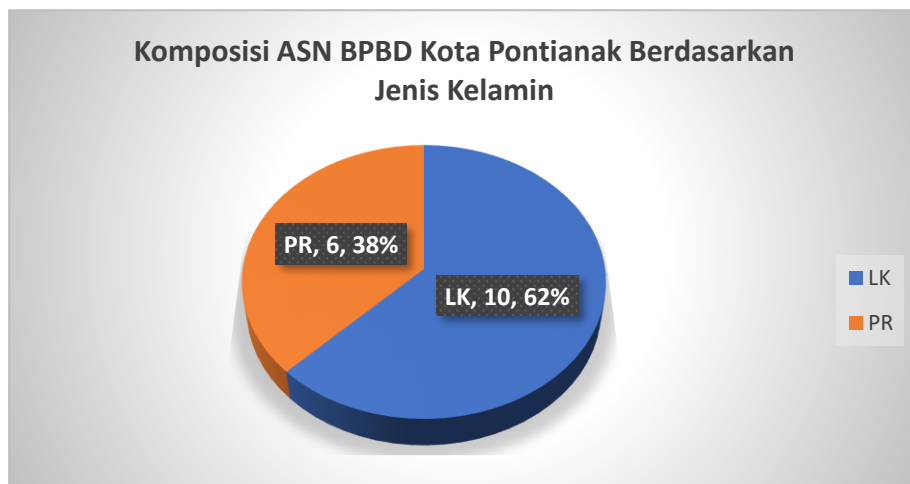
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh WALI KOTA di bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

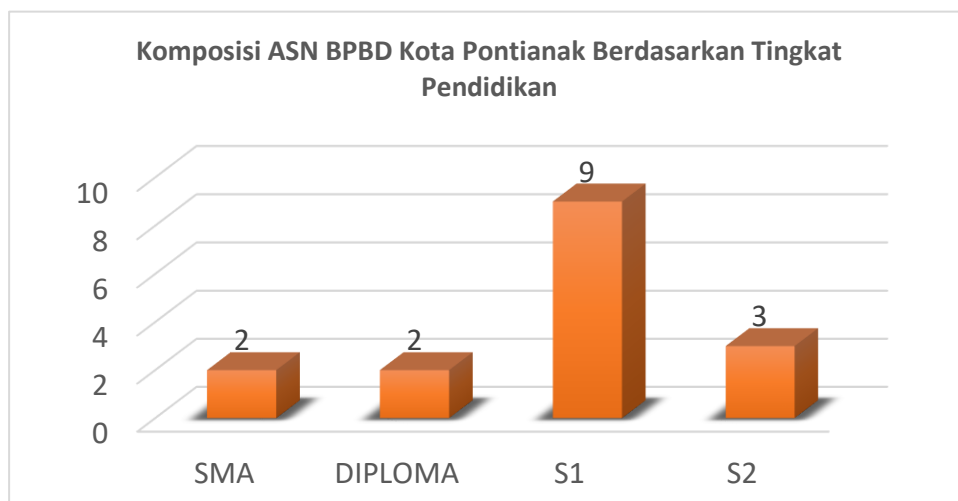
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2023 BPBD Kota Pontianak didukung oleh 16 orang ASN dan 2 orang tenaga kontrak atau jasa orang perorangan. Dari 16 orang ASN tersebut terdiri dari 10 orang ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan 6 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan.

Gambar 1.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin



Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ASN adalah lulusan S2 sebanyak 3 orang, lulusan S1 sebanyak 9 orang, lulusan diploma sebanyak 2 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 2 orang

Gambar 1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan



5. Sumber Daya Keuangan

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, maka pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.853.824.474,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
BPBD Kota Pontianak Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	5.951.552.830,00	4.853.824.474,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.705.501.430,00	4.664.830.474,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.263.043.774,00	2.784.466.722,00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.442.457.656,00	1.880.363.752,00
5.2	BELANJA MODAL	246.051.400,00	188.994.000,00
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	76.342.600,00	95.994.000,00
5.2.5	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	169.708.800,00	93.000.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak :

6.1 Gedung Kantor

Sejak Januari 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menempati bangunan eks Kantor Penerangan di Jalan

Let.Jend. Sutoyo No. 71 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan.

6.2 Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis mini bus tahun 2007 sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 2) Mobil operasional lapangan (mobil komando), jenis pickup double cabin tahun 2007, dalam kondisi baik;
- 3) Mobil operasional lapangan jenis pickup sejumlah 1 unit dalam kondisi baik;
- 4) Sepeda motor operasional sekretariat sejumlah 1 unit dalam kondisi baik
- 5) Sepeda motor operasional lapangan berjumlah 3 unit dalam kondisi baik.

6.3 Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD Kota Pontianak maupun hibah dari BNPB.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pontianak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Model	Ukuran	Jumlah Unit	Keterangan Mutasi dll
1	Lift Jack		60/7000lb	2	
2	Carry Bag	G-801 Stronghold -Waterproof	60 L	1	
3	Sarung Tangan Kulit	Co-Trek		4	
4	Helm	USA V Guard		8	
5	Carry Bag	Eiger	35 L		
6	Head Lamp	Petzl		5	
7	Tripod Resceu	CAMP/EVO	500 Kg		
8	Chainsaw	STIHL		2	
9	Nozle	Zhied - Branchpipe		2	Pembelian

10	Selang Penghantar	Fire Hose Zhiield - REd	1.5 x 20 m	5	Pembelian
11	Mesin Pompa Karhutla (Utama)	Tekiro Ryu			Hibah BNPB
12	Mesin Pompa Karhutla (Menengah)				Hibah BNPB
13	Mesin Pompa Apung	Shimizu		2	Hibah BNPB
14	Flexible Tank 1500 Galon		5677 liter		Hibah BNPB
15	Genset 5 KVA	Honda Tropic		2	Hibah BNPB
16	Lampu Senter HID Search Light	Polarion			Hibah BNPB
17	Handy Talky	Icom IC - V8		2	Hibah BNPB
18	Velbed			7	Hibah BNPB
19	Tenda Keluarga			5	Hibah BNPB
20	Tenda Regu			3	Hibah BNPB
21	Tenda Pleton			2	Hibah BNPB
22	Tenda Posko				Hibah BNPB
23	Perahu Polyethylene			2	Hibah dari BNPB 1 Set perahu polyethylene lengkap
24	Mesin Perahu kap 9,8 PK	Tohatsu		2	
25	Chainsaw				
26	Sepatu Pengaman			20	
27	Tangki Air (2000 L)			1	Pembelian (Covid 19)
28	Connector selang Y (sambungan)		2.5 inch ke 2 x 1.5 inch		Pembelian
29	Nozel		1.5 inch	2	Pembelian
30	Selang Penghantar	Firehose rubber + machino coupling	1.5 inch x 20 meter	6	
31	Sprayer			10	
32	Connector Selang Pemadam Dua Arah		1,5 inch x 1,5 inch	2	
33	Selang Penghantar	Jet star	20 meter x 2,5 inch	2	
34	Selang Penghantar	Jet star	30 meter x 1.5 Inch	3	
35	connector selang pemadam				
36	Selang Pemadam Kebakaran	Jet Star Fire Hose	2,5 inch x 20 meter	5	Selang Jet Star 2,5 inch x panjang 20 m (Jet Star Fire Hose) Warna Orange
37	Selang Pemadam Kebakaran	Jet Star Fire Hose	1,5 inch x 30 meter	8	Selang Jet Star 1,5 inch x panjang 30 m (Jet Star Fire Hose) Warna Orange

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISUUED*)

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kota Pontianak yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat *responsif* ke *preventif* dengan karakter *Good Governance*.

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun yang bersumber dari lingkungan eksternal. Isu-isu strategis tersebut adalah:

1) Faktor Internal

Faktor-faktor yang saat ini merupakan permasalahan BPBD Kota Pontianak dalam upaya penanggulangan bencana adalah:

- 1) Belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang memadai, sebagai acuan para pihak penyelenggara penanggulangan bencana;
- 2) Keterbatasan aparatur dari segi jumlah dan kualitas yang belum sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana;
- 3) Perlunya upaya penguatan kelembagaan mengingat BPBD memegang peranan strategis sebagai koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Belum tertintegrasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah;
- 5) Masih kurangnya dukungan sistem dan proporsi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Faktor Eksternal

- 1) Kondisi wilayah Kota Pontianak yang berada di dataran rendah berpotensi mengalami bencana banjir dan kondisi tanah di beberapa

Kawasan merupakan lahan gambut, memiliki potensi yang sangat tinggi terjadinya kebakaran lahan;

- 2) Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral;
- 3) Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Pesatnya perkembangan pembangunan disertai kurangnya pengendalian pengaturan tata ruang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana;
- 5) Adanya perubahan iklim global sehingga berpotensi meningkatkan intensitas ancaman bencana;



Sabtu, 11 Februari 2023 11.28.10 WIB
-0°4'23,471"S 109°20'2,019"E
Jalan Perdana

Kegiatan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Perdana, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.

Kecamatan Pontianak Tenggara
Kota Pontianak
Kalimantan Barat
RPB BPBD KOTA PONTIANAK - LUTHER

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020 - 2024, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Pontianak.

Sejalan dengan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, visi Kota Pontianak adalah:

**“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN
YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”**

Maksud dari visi tersebut adalah:

Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa

Berwawasan lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

Cerdas

Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dgn pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi

Bermartabat

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel

Untuk mewujudkan visi tersebut, diuraikan dalam 5 misi Pemerintah Kota Pontianak, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Dari kelima misi Pemerintah Kota Pontianak tersebut, BPBD Kota Pontianak mengampu misi ke-5 Pemerintah Kota Pontianak yaitu untuk Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2020-2024, penanggulangan bencana termasuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tugas dan Fungsi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
 Tahun 2020-2024

VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

TUJUAN KOTA	INDIKATOR TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA									TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN					PROGRAM PENDUKUNG
			URAIAN IKU	SATUAN	Kondisi Awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024					SATUAN	2020	2021	2022	2023	
Misi ke-5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan																				
5.2. Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib	5.2.3 Indeks Resiko Bencana			Indeks	85,66	83	81	79	77	75										
	5.2.3 Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,45	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	5.2.3 Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana	Jumlah				1 kelurahan	2 kelurahan	Program Penanggulangan Bencana

)* Sesuai Perubahan Kedua Renstra 2020-2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan Wali Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja, adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah / atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2023 merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program / kegiatan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

NO	SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
			INDIKATOR	TARGET	
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	1 Kelurahan	Rp. 1.373.662.900,-



Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pontianak melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	1 kelurahan	1 kelurahan	100

Dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka perlu dilakukan Pembentukan Kelurahan / Desa tangguh bencana di setiap kabupaten / kota di Indonesia. Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) merupakan kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di

wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Untuk tahun 2023, BPBD Kota Pontianak telah melakukan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh bencana sebanyak 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Parit Tokaya di Kecamatan Pontianak Selatan. Kelurahan Parit Tokaya dipilih untuk menjadi kelurahan tangguh bencana dikarenakan Kelurahan Parit Tokaya termasuk salah satu kelurahan yang rawan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Inisiasi pembentukan kelurahan tangguh bencana disahkan melalui Surat Keputusan Lurah Parit Tokaya Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dan Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2023. Dengan demikian, target BPBD Kota Pontianak untuk membentuk kelurahan tangguh bencana sebanyak satu kelurahan berhasil dilaksanakan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tercapainya realisasi kinerja sebesar 100% tersebut tidak lain karena dukungan sumber daya keuangan yang memadai, dan koordinasi yang baik dengan pihak Kelurahan Parit Tokaya, serta ditambah dengan bantuan fasilitator yang telah berpengalaman dalam membentuk kelurahan/desa tangguh bencana di beberapa daerah di Kalimantan Barat.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.2
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Penanggulangan Bencana	1.373.662.900	1.115.411.820	81,20	100 %	18,80 %

BPBD Kota Pontianak telah berhasil mencapai target indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 81,20%. Artinya, BPBD Kota Pontianak telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 18,80 % atau sebesar Rp.258.251.080,- untuk tahun anggaran 2023.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam melakukan pelayanan di bidang penanggulangan bencana, dilakukan melalui 1 program, 4 kegiatan, dan 13 sub kegiatan. Khusus untuk program dan kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian indikator kinerja yaitu Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk, kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Program dan kegiatan pendukung tercapainya keberhasilan kinerja dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tabel Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM	ANGGARAN KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN
					INDIKATOR	TARGET			
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	1 Kelurahan	1.373.662.900,00	237.458.200,00	13.162.800,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tercapainya kinerja berupa terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) sebanyak 1 kelurahan tak lepas dari dukungan anggaran yang

memadai, ditambah dengan koordinasi yang baik dengan pihak kelurahan, yaitu Kelurahan Parit Tokaya, sehingga Katana di Kelurahan Parit Tokaya dapat terbentuk.

Gambar 3.1
Kegiatan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana
Dipandu oleh Seorang Fasilitator



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel. 3.4
Capaian Indeks Kinerja Utama Tahun 2022 dan
Target serta Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	--	1 kelurahan	1 kelurahan

Indikator kinerja utama untuk tahun 2022 berbeda dengan tahun 2023, dimana untuk indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022 adalah Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Perubahan IKU ini dilakukan setelah adanya masukan dari tim asistensi dengan tim dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan RB) pada saat melakukan evaluasi penyusunan indikator kinerja saat penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan Indikator Kinerja Utama berupa Jumlah Kelurahan Tangguh yang terbentuk untuk tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya menjadi sulit untuk dilakukan perbandingan dikarenakan masing-masing indikatornya berbeda.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel. 3.5
Realisasi Indeks Kinerja Utama Tahun 2021 dan 2022 dan Target serta Realisasi Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	1 Kelurahan	1 kelurahan
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,45	0,45		

Terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2023, yang semula indikator untuk tahun 2023 adalah meningkatnya indeks kapasitas daerah berubah menjadi jumlah kelurahan Tangguh bencana yang terbentuk. Untuk tahun 2023 sendiri capaian kinerja untuk membentuk kelurahan tangguh bencana dapat terpenuhi dengan terbentuknya Kelurahan Parit Tokaya di Kecamatan Pontianak Selatan sebagai Kelurahan Tangguh Bencana.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel. 3.6
Realisasi Indeks Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Target Nasional (jika ada)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya kawasan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	1 Kelurahan	-

Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) merupakan kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Katana dibentuk disesuaikan dengan kondisi kerentanan suatu kelurahan terhadap ancaman bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri tidak menargetkan jumlah Katana yang harus dibentuk di tiap-tiap daerah. Namun idealnya, jika suatu kelurahan dinyatakan sebagai wilayah yang rawan terhadap bencana (baik 1 maupun beberapa ancaman bencana), maka sudah semestinya kelurahan/wilayah tersebut diberikan pelatihan dan pendampingan agar kelurahan tersebut dapat menjadi kelurahan tangguh bencana.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Dalam melaksanakan hasil pekerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan Upaya mengatasi permasalahannya, adapun rincian permasalahan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 3.7
Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kurangnya informasi dan pengalaman dalam membentuk sebuah kelurahan menjadi kelurahan Tangguh.	Meminta bantuan fasilitator daerah yang sudah berpengalaman dalam membentuk kelurahan tangguh.
2	Kurangnya anggaran untuk mendukung sebuah kelurahan menjadi sebuah kelurahan tangguh	Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait kebutuhan penambahan anggaran untuk mendukung terbentuknya kelurahan Tangguh bencana.
3	Belum adanya dasar hukum / kebijakan yang dibuat untuk mendukung terbentuknya kelurahan tangguh di kelurahan yang rawan bencana.	Perlu diusulkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan kelurahan tangguh sebagai dasar dalam melakukan langkah lebih lanjut termasuk dalam melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan.
4	Kurangnya kompetensi petugas / ASN BPBD Kota Pontianak terkait pembentukan kelurahan tangguh.	Mencari informasi tentang penyelenggaraan diklat terkait maupun melakukan studi banding ke BPBD kabupaten lain yang terdekat.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak didukung dengan program kerja yang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan, yang di anggarkan dan tertuang dalam DPA Tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2023 sebesar Rp.4.853.824.474,00.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja BPBD Kota Pontianak tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dan Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan penanganan, dibagi dengan jumlah kejadian bencana, dikali 100%.	100	persen	1.373.662.900	100	persen	1.115.411.820
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi dan edukasi bencana, khususnya di wilayah rawan bencana.	100	persen	141.184.900	100	persen	138.067.000
1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1	dokumen	130.222.100	1	dokumen	128.217.000

2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.		50	orang	10.962.800	50	orang	9.850.000
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah WN yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dibagi jumlah WN yang berada di wilayah rawan bencana.	100	persen	88.808.800	100	persen	177.789.900
1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi.		1	dokumen	2.750.000	0	dokumen	2.750.000
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		50	orang	19.962.800	50	orang	18.662.500
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		1	dokumen	50.185.000	1	dokumen	46.030.000
4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas		2	unit	21.690.000	2	unit	19.980.000

4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		1	kawasan	13.162.800	1	kawasan	13.037.500
5. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		1	dokumen	21.205.800	1	dokumen	21.193.000
6. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		50	orang	59.852.400	132	orang	56.136.900
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dibagi dengan WN yang menjadi korban bencana, dikali 100%	100	persen	1.041.139.200	100	persen	797.079.920
1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat.		1	dokumen	250.696.000	1	dokumen	237.430.000
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana.		27	orang	657.047.200	12	orang	495.298.000
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		55	orang	130.926.000	91	orang	61.601.920
4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.		1	Laporan	470.000	1	Laporan	

Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase SOP yang dibuat	Jumlah SOP yang dibuat dibagi target SOP yg direncanakan untuk disusun, dikali 100%	100	persen	2.530.000	100	persen	2.475.000
1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kaupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibuat.		1	dokumen	2.530.000	1	SOP	2.475.000



Penanganan pohon tumbang di Jalan Ampera akibat angin kencang oleh Relawan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pontianak.

0.038757S 109.28784785E

**Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak
Kalimantan Barat
07/04/23 13.42**

Pada tahun 2023, BPBD Kota Pontianak telah membentuk 1 Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), yaitu Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Pembentukan Kelurahan Parit Tokaya sebagai Kelurahan Tangguh Bencana diharapkan kelurahan tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, sehingga kelurahan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

Pontianak, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak,

Ir. R.M. NASIR, MT
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19690416 199603 1 005